

ANNUAL REPORT 2008

Penindakan kasus oleh KPK

I. Penyelidikan

Penyelidikan telah dilaksanakan terhadap 70 (tujuh puluh) kasus.

II. Penyidikan

Penyidikan dilaksanakan terhadap sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, yang terdiri dari 7 (tujuh) perkara sisa tahun 2007 dan 46 (empat puluh enam) perkara tahun 2008.

| Tahun | Kasus | Lokasi | Pelaku |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 | Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Medan, dan Makassar dan merk Tohatsu tipe V 80 ASM menggunakan APBN dan APBD tahun 2003 s.d. tahun 2005 | Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Medan, dan Makassar | SHD alias HSD (Swasta) |
| | Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM dan merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan APBD tahun 2003 dan APBD tahun 2005 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | IR (Kasubag Analisa Kebijakan dan Keuangan Daerah/Pimpro dan KPA) |
| | Perkara TPK dalam penyalahgunaan perijinan pada penerbitan IUPHHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Pelalawan | TAJ (Bupati Pelalawan) |
| | Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM TA 2003 s.d. 2005 di Pemerintahan Provinsi Riau | Pemerintahan Provinsi Riau | SD (Gubernur Riau) |
| | Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/BLK Depnakertrans | UPT/BLK Depnakertrans | TZ (Kasubdit Pengembangan Sistem Depnakertrans) |
| | Perkara TPK dalam penerimaan uang tunai dan bilyet giro pada pengurusan anggaran untuk kegiatan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana BAPETEN tahun 2004 | BAPETEN | NAR (Anggota DPR RI) |
| | Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Morita di Pemerintah Kota Medan APBD tahun 2005 dan penyalahgunaan APBD Kota Medan TA 2002 s.d. 2006 | Kota Medan | A (Walikota Medan) dan R (Wakil Walikota Medan) |
| | Perkara TPK dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat | Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat | AH (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK) dan AK (selaku Ketua Panitia pengadaan) |
| | Perkara TPK dalam proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung perwakilan Pemprov Jambi di DKI Jakarta TA 2004 | DKI Jakarta | CS (Sekretaris Daerah Propinsi Jambi) |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Perkara TPK dalam penggunaan dana BI yang dikelola oleh YPPI untuk kepentingan BI dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terjadi tahun 2003 | | BA (Gubernur Bank Indonesia) |
| Perkara TPK dalam penggunaan dana BI yang dikelola oleh YPPI untuk kepentingan BI dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terjadi tahun 2003 | | RS (Pimpinan BI Surabaya) dan OHT (Direktur Bidang Hukum BI) |
| Perkara TPK dalam permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung pantai Air Telang Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | ST (Anggota DPR) |
| Perkara TPK terkait Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya | | UTG (Kasubdit TPE Kejagung RI) |
| Perkara TPK terkait setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri | | AS (Swasta) |
| Perkara TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 | Kabupaten Kutai Kartanegara | SA (Wakil Bupati Kutai Kartanegara) |
| Perkara TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004 | Lombok Barat | I (Bupati Lombok Barat) |
| Perkara TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004 | Lombok Barat | IH (Swasta) |
| Perkara TPK yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya | | ANN (Anggota DPR RI) |
| Perkara TPK yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya | | A (Sekretaris Daerah Bintan) |
| Perkara TPK yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menerima pemberian sejumlah uang dari Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia | | HY (Anggota DPR RI) dan AZA (Anggota DPR RI) |
| Perkara TPK renovasi gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM dan rumah-rumah dinas TA 2003 | | MSH (Mantan Duta Besar RI untuk Singapura) |
| Perkara TPK renovasi gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM dan rumah-rumah dinas TA 2003 atas | | E (Mantan Bendaharawan/Kabag TU untuk Singapura) dkk |
| Perkara TPK atas penerbitan radiogram dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V 80 ASM dan pembebasan bea masuk/pajak mobil pemadam kebakaran merk Morita di beberapa Pemprov/pemkab/ Pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD TA 2002 s.d. 2005 | | OSM (Mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri) dkk |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Perkara TPK atas penyimpangan atau rekayasa dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat yang menggunakan APBN-P tahun 2006 | Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | DKW (Swasta) |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Pelalawan | ST (Mantan Kadishut Provinsi Riau) dkk |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Pelalawan | AR (Mantan Kadishut Propinsi Riau) dkk |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan | Kabupaten Pelalawan | BH (Mantan Kadishut Propinsi Riau) dkk |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | BE (Mantan Sesditjen PPTKDN Depnakertrans RI) |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | MS (Swasta) |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | EF (Swasta) |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | IWS (Swasta) |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | VD (Swasta) |
| Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TZ dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | K (Swasta) |
| Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI Kota | KJRI Kota Kinabalu | AH (Konjen RI Kota Kinabalu), RE (Kabid |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinabalu tahun 1999 s.d. 2000 | | Konekpensosbud KJRI Kota Kinabalu), AN (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching) dan KS (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI kota Kinabalu di Tawau) |
| Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBPN terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI kota Kinabalu tahun 2001 s.d. 2003 | KJRI kota Kinabalu | MS (Konjen RI Kota Kinabalu), MTM (Kabid Konekpensosbud KJRI Kota Kinabalu), IR (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Kuching) dan MT (Kasubid Imigrasi pada Kantor Penghubung KJRI Kota Kinabalu di Tawau) |
| Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBPN terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI kota Kinabalu tahun 1999 s.d. 2000 | KJRI kota Kinabalu | KR (Konjen RI Kota Kinabalu) dkk |
| Perkara TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005 dan 2006 | Kabupaten Kutai Kertanegara | SB (Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| Perkara TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan | | BR (Anggota DPR RI) |
| Perkara TPK setiap orang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya | | DS (Swasta) |
| Perkara TPK sehubungan dengan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | YEF (Anggota DPR RI) |
| Perkara TPK dalam penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara di Kabupaten Yapen Waropen tahun 2005 – 2006 | Kabupaten Yapen Waropen | DSB (Bupati Yapen Waropen) |
| Perkara TPK sehubungan dengan pemberian sejumlah dana kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | ACT (Swasta) |
| Perkara TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, <i>stoom walls</i> dan <i>dump truck</i> oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003 | Pemerintah Jawa Barat | DS (Mantan Gubernur Jawa Barat) bersama-sama dengan tersangka WK (Mantan Kepala Biro |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| | | | Perlengkapan) dan IB (Mantan Kepala Biro Pengendalian Program) |
| Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, mobil tangga, <i>stoom walls</i> , <i>backhoe loader</i> , dan <i>dump truck</i> pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 dan 2004 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | | YS (Swasta) |
| Perkara TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan | | | MI (Anggota KPPU) |
| Perkara TPK setiap orang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya | | | BS (Swasta) |
| Perkara TPK berupa penerimaan sejumlah uang terkait dengan proses impor barang yang masuk atau diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) jalur hijau pada kantor pelayanan utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok | Tanjung Priok | | ASP (Pegawai Bea Cukai) |
| Perkara TPK dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2004 s.d. 2006 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara | | AD (Bupati Aceh Tenggara) |
| Dugaan TPK atas pelaksanaan kegiatan kerjasama operasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran gula kristal putih antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Perum Bulog tahun 2001 s.d. 2004 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan Perum Bulog | | RD (Direktur Keuangan PT RNI) |
| Dugaan TPK penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado TA 2006 | Pemerintah Kota Manado | | JRR (Walikota Manado) |
| Dugaan TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk kepentingan Bank Indonesia dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban | Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) | | ATP, BBH, AT, dan MHS (Mantan Deputi Dewan Gubernur Bank Indonesia) |
| Dugaan TPK berupa Penyelenggara Negara menerima sesuatu, hadiah atau janji yang terjadi pada Strategic Business Unit (SBU) II wilayah Jawa Bagian Timur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Strategic Business Unit (SBU) II wilayah Jawa Bagian Timur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | | T (General Manager PT PGN – SBU II Jabati) |
| Dugaan TPK Penyalahgunaan APBD Kabupaten Situbondo TA 2005 – 2007 | Kabupaten Situbondo | | I (Bupati Situbondo) |

III. Penuntutan

Penuntutan dilaksanakan sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara yang terdiri dari 6 (enam) perkara sisa tahun 2007 dan 37 (tiga puluh tujuh) perkara tahun 2008.

| Tahun | Kasus | Pelaku | Lokasi | Vonis |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2008 | Perkara TPK pada proyek peningkatan kelembagaan dan sarana dalam pengadaan tanah di BAPETEN tahun 2004 | Sugiyono Prasojo dan Hieronimus Abdul Salam Als H Abdul Salam | BAPETEN | Kasasi |
| | Perkara TPK pada proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD tahun 2003 dan APBD tahun 2004 | Baso Amiruddin Maula | Pemerintah Kota Makassar | Kasasi |
| | Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004 s.d. 2007 | H. Agus Supriadi | Garut | Kasasi |
| | Perkara TPK penyusunan atau pemberian sejumlah uang kepada pegawai negeri/penyelenggara negara | Irawady Yoenoës | | Kasasi |
| | Perkara TPK penyusunan atau pemberian sejumlah uang kepada pegawai negeri/penyelenggara negara | Freddy Santoso | | Kasasi |
| | Perkara TPK pada proyek pekerjaan pemeriksaan penggunaan TKA/Audit Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans | MSM. Simanihuruk dan Suseno Cipto Mantoro | Ditjen PPK Depnakertans | Kasasi |
| | Perkara TPK pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami Tengah pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah yang menggunakan anggaran APBN-P tahun 2006 | Hari Purnomo dan Margaretha Elisabeth Tutuarima | Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah | |
| | Perkara TPK dalam pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Malaysia periode tahun 2003 s.d. 2005 | Rusdi Hardjo dan Arihken Tarigan | Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Malaysia | Kasasi |
| | Perkara TPK dalam penyalahgunaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dalam pembuatan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) Pembangunan Bandara Samarinda-Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2003 s.d. 2004 | Vonnie Anneke Panambunan | Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur | <i>Inkracht</i> |
| | Perkara TPK dalam menerima hadiah atau janji pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN pada tahun 2004 | Noor Adenan Razak | BAPETEN | <i>Inkracht</i> |
| | Perkara TPK dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM dan merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 | Ismed Rusdany | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | <i>Inkracht</i> |
| | Perkara TPK dalam penerbitan IUPHHKHT/IPK tahun 2001 – 2006 di Wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang | H. Tengku Azmun Jafaar, SH (Bupati Pelalawan Provinsi Riau) | Wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | Banding |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| berlaku | | | |
| Perkara TPK memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau gaji yang bertentangan dengan kewajibannya | Arthalyta Suryani alias Ayin | | Banding |
| Perkara yang berhubungan dengan dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran, ladder truck merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 | Drs. Abdillah, Ak, MBA | Pemerintah Kota Medan | Banding |
| Perkara yang berhubungan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran, <i>ladder truck</i> merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 s.d. 2006 | Drs. H. Ramli, MM | Pemerintah Kota Medan | <i>Inkracht</i> |
| Perkara yang berhubungan dengan pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM di Provinsi Riau pada tahun 2002 s.d. 2003 | Ssaleh Djasit, SH | Provinsi Riau | <i>Inkracht</i> |
| Perkara yang berhubungan dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau gaji yang bertentangan dengan kewajibannya | Urip Tri Gunawan, SH | | Kasasi |
| Perkara yang berhubungan dengan telah mengambil dan menggunakan dana Bank Indonesia yang berada dan dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk kepentingan Bank Indonesia dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Ir. Burhanuddin Abdullah, MA | Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) | Banding |
| Perkara yang berhubungan dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya | Drs. Azirwan | | <i>Inkracht</i> |
| Perkara yang berhubungan dengan pembangunan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di Jalan Cidurian No. 15 - 17 Cikini Jakarta Pusat pada tahun 2004 | Drs. H. Abdul Chalik Saleh, MM | | <i>Inkracht</i> |
| Perkara TPK penggunaan dana Bank Indonesia (BI) yang dikelola oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk kepentingan Bank Indonesia dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak | Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) | Banding |
| Perkara TPK dalam pelaksanaan proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan yang dananya bersumber dari ABT DIP APBN tahun 2004 dan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/BLK yang dananya bersumber dari ABT DIKS tahun 2004 pada Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan dalam Negeri (Ditjen PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | H. KGS. Taswin Zein, SE, MM | Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan dalam Negeri (Ditjen PPTKDN) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Perkara TPK renovasi gedung KBRI Singapura, Wisma Dubes, Wisma DCM dan rumah-rumah dinas TA 2003 | Moch Slamet Hidayat dan Erizal | | |
| Perkara dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap TA 2006 di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat | Asep Hartiyomah dan Ade Kusmana | Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat | |
| Perkara dalam Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya | AL Amin Nasution | | |
| Perkara TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menerima pemberian sejumlah uang dari Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) secara politis dan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia | Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin | | |
| Perkara dalam TPK setiap orang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewajibannya | Dedy Suwarsono | | Banding |
| Perkara dalam TPK permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung pantai Air Telang Sumatera Selatan | Sarjan Tahir | Sumatera Selatan | |
| Perkara TPK ruislagh tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004 | Izzat Husein | Lombok Barat Prov. NTB | |
| Perkara TPK ruislagh Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati Lombok Barat Prov. NTB tahun 2004 | Iskandar | Lombok Barat Prov. NTB | |
| Perkara dalam TPK penyimpangan dan rekayasa pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan gelombang tsunami, pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan anggaran APBN-P tahun 2006 | David Kurniawan Wiranata | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat | |
| Perkara dalam TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005 dan 2006 | Setia Budi | Kabupaten Kutai Kertanegara | |
| Perkara dalam TPK penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005 | Samsuri Aspar | Kabupaten Kutai Kertanegara | |
| Perkara dalam TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan | Bulyan Royan | | |
| Perkara dalam TPK sehubungan dengan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan | Yusuf Erwin Faishal | Sumatera Selatan | |
| Perkara dalam TPK memberikan dan atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan | Billy Sindoro | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| | jabatan atau kewajibannya | | | |
| | Perkara TPK turut serta terkait perbuatan H. KGS Taswin Zein, SE, MM. (selaku pimpro DIP APBN TA 2004 dan selaku atasan langsung bendaharawan DPKTKI Ditjen PPTKDN TA 2004) Dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Bachrun Effendi | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | |
| | Perkara TPK turut serta terkait perbuatan H. KGS Taswin Zein, SE, MM. (selaku pimpro DIP APBN TA 20014 dan selaku atasan langsung bendaharawan DPKTKI Ditjen PPTKDN TA 2004) Dkk, dalam proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan yang sumber dananya berasal dari ABT DIKS TA 2004 pada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | Vaylana Dharmawan | Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI | |
| | Perkara TPK dalam penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara di Kabupaten Yapen Waropen tahun 2005 – 2006 | Daud Solleman Betawi | Kabupaten Yapen Waropen | |
| | Perkara dalam TPK pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI Kota Kinabalu tahun 1999 s.d. 2000 | Arifin Hamzah, Radite Adyatmo, Ayi Nugraha dan Kamso Simatupang | KJRI Kota Kinabalu | |
| | Perkara dalam TPK pemberian sejumlah dana kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan | Chandra Antonio Tan | Sumatera Selatan | |
| | Perkara dalam TPK pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI Kota Kinabalu tahun 2001 s.d. 2003 | Muchamad Sukarna, Mas Tata Machron, Irsyafli Rasoel, dan Makdum Tahir | KJRI Kota Kinabalu | |
| | Perkara dalam TPK pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KJRI Kota Kinabalu tahun 1999 s.d. 2000 | Kurniawan Roebadi | KJRI Kota Kinabalu | |

IV. Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara dengan rincian sebagai berikut:

| Tahun | Kasus | Pelaku | Lokasi | Putusan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 | Perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 | Eman Rachman | Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan HAM RI | Putusan PN: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp250.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp3.736.275.017,00 subsidair 1 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | (satu) tahun penjara |
| Perkara TPK dalam turut serta atau membantu SUWARNA AF melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan ijin pemanfaatan kayu | Martias alias Pung Kian Hwa | Kalimantan Timur | Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp346.823.970.564,00 subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara; (Denda, uang pengganti, dan biaya perkara telah disetor ke Kas Negara) |
| Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 s.d. 2003 | Hadi A. Wayarabi dan Suparba W. Amiarsa | KBRI Kuala Lumpur | Putusan PN: <i>Terdakwa I:</i> Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda Rp150.000.000,00 subsidair 5 (lima) bulan penjara, uang pengganti sebesar Rp1.750.000.000,00 subsidair 2 (dua) tahun penjara. <i>Terdakwa II:</i> Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp150.000.000,00 subsidair 5 (lima) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 subsidair 6(enam) bulan penjara; (Denda, biaya perkara, dan uang pengganti sebagian telah disetor ke Kas Negara) |
| Perkara TPK dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999 s.d. 2002 | Suwarna Abdul Fatah | Kalimantan Timur | Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp250.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan penjara; (Denda dan biaya perkara telah disetor ke Kas Negara) |
| Peninjauan Kembali perkara yang berhubungan dengan TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU | Nazaruddin Sjamsuddin | | Putusan PK (Peninjauan Kembali): Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp300.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, hukuman uang pengganti US\$45,000.00 diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; (Denda, uang, dan biaya perkara pengganti telah disetor ke Kas Negara) |
| Perkara TPK dalam penyalahgunaan | Vonnie | Pemerintahan | Putusan PN Jakarta Pusat: |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dalam pembuatan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) Pembangunan Bandara Samarinda - Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2003 s.d. 2004</p> | <p>Anneke Panambunan</p> | <p>Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur</p> | <p>Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp100.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, uang pengganti Rp4.006.185.147,00 yang dikompensasikan dari barang bukti berupa uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp4.048.000.000,00 dan kelebihananya dikembalikan kepada terdakwa dan biaya perkara Rp10.000,00; (Denda, uang pengganti, dan biaya perkara telah disetor ke Kas Negara)</p> |
| <p>Perkara TPK penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya pada Anggaran Belanja Rutin Kepala Daerah Kalimantan Selatan tahun anggaran 2003 s.d. 2004</p> | <p>Drs. HM. Sjachriel Darham</p> | <p>Kalimantan Selatan</p> | <p>Putusan Kasasi (MA): Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, uang pengganti Rp5.868.252.731,00 apabila tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang (tidak ada subsidair) dan biaya perkara Rp2.500,00; (Biaya perkara sudah dibayar, sedangkan denda dan uang pengganti belum dibayar)</p> |
| <p>Perkara berhubungan dengan TPK turut serta atau membantu H. Suwarna A.F. (Gubernur Prov. Kaltim) melakukan TPK pada pelaksanaan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Prov. Kalimantan Timur yang diikuti dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada tahun 1999 - 2002</p> | <p>Ir. H. Uuh Aliyuddin, MM</p> | <p>Prov. Kalimantan Timur</p> | <p>Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, biaya perkara Rp2.500,00; (Biaya perkara belum dibayar dan akan menjalani hukuman badan selama 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti denda)</p> |
| <p>Perkara sehubungan dengan TPK turut serta atau membantu H. Suwarna A.F. (Gubernur Prov. Kaltim) melakukan TPK pada pelaksanaan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Prov. Kalimantan Timur yang diikuti dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada tahun 1999 - 2002</p> | <p>DR. Ir. H. Robian, M.Si.</p> | <p>Prov. Kalimantan Timur</p> | <p>Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, biaya perkara Rp2.500,00; (Biaya perkara belum dibayar dan menjalani hukuman badan selama 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti denda)</p> |
| <p>Perkara sehubungan dengan TPK turut serta atau membantu Rustam Effendy Sidabutar, SH, M.Si melakukan dalam pengadaan bus Proyek Busway di Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta yang</p> | <p>Budhi Susanto</p> | <p>Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta</p> | <p>Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp2.124.717.264,00 subsidair 2 (dua) tahun, dan biaya</p> |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menggunakan APBD tahun 2003 dan 2004 | | | Perkara Rp2.500,00; (Denda dan biaya perkara telah dibayar, sedangkan uang pengganti belum dibayar, maka terpidana menyerahkan 13 (tiga belas) bidang tanah yang terletak di Kab. Tangerang Prov. Banten untuk dilelang) |
| Perkara sehubungan dengan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya berkaitan dengan Perkara TPK dalam pengadaan tanah pada Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana (PKS) BAPETEN tahun 2004 | H. Noor Adenan Razak | BAPETEN | Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun, dan denda Rp150.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara Rp10.000,00; (Denda dan biaya perkara telah dibayar terpidana) |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 | Ismed Rusdany | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp100.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara, uang pengganti Rp14.400.000,00 dan biaya perkara Rp10.000,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai hutang kepadanya atau menerima hadiah atau janji yang terjadi dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang terjadi sejak tahun 2002 s.d. 2004 | Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS | Departemen Kelautan dan Perikanan | Putusan PK (MA): Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 atau menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat: pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara Rp10.000,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur | Syaukani HR | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur | Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp250.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, uang pengganti Rp49.367.938.279,95 subsidair 3 (tiga) tahun penjara dan biaya perkara Rp2.500,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam penggunaan dana APBD TA 2003 pada Pos Dana Tak terduga, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Pinjaman Daerah Kabupaten Kendal | Warsa Susilo | Kabupaten Kendal | Putusan Kasasi (MA): Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, uang pengganti Rp440.000.000,00 subsidair 1 (satu) tahun penjara dan biaya perkara Rp2.500,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terkait pengutan tarif jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur Malaysia periode tahun 1999 s.d. 2003 | Prihatna Setiawan | Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur Malaysia | Putusan Kasasi (MA): Pidana Penjara 6 (enam) tahun, denda Rp300.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, uang pengganti Rp11.762.908.610,00 subsidair 3 (tiga) tahun penjara dan biaya perkara Rp20.000,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya | Azirwan | | Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp100.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan biaya perkara Rp10.000,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam pengadaan Automatic Finger System/AFIS di Ditjen AHU Departemen Hukum dan Ham RI | Zulkarnain Yunus dan Apendi | Ditjen AHU Departemen Hukum dan Ham RI | Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun, denda masing-masing Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara masing-masing Rp2.500,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam pengadaan 20 unit mobil Pemadam Kebakaran type V 80 ASM di Provinsi Riau pada tahun 2002 – 2003 | Saleh Djasit | Provinsi Riau | Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara Rp10.000,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya | Hendy Boedoro | | Putusan PN: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara, uang pengganti Rp13.121.000.000,00 subsidair 3 (tiga) tahun penjara, dan biaya perkara Rp2.000,00 |
| Perkara berhubungan dengan TPK dalam pengadaan Automatic Finger System/AFIS di Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI | Apendi | Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI | Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara Rp2.500,00 |

V. Kasus-kasus yang dilimpahkan

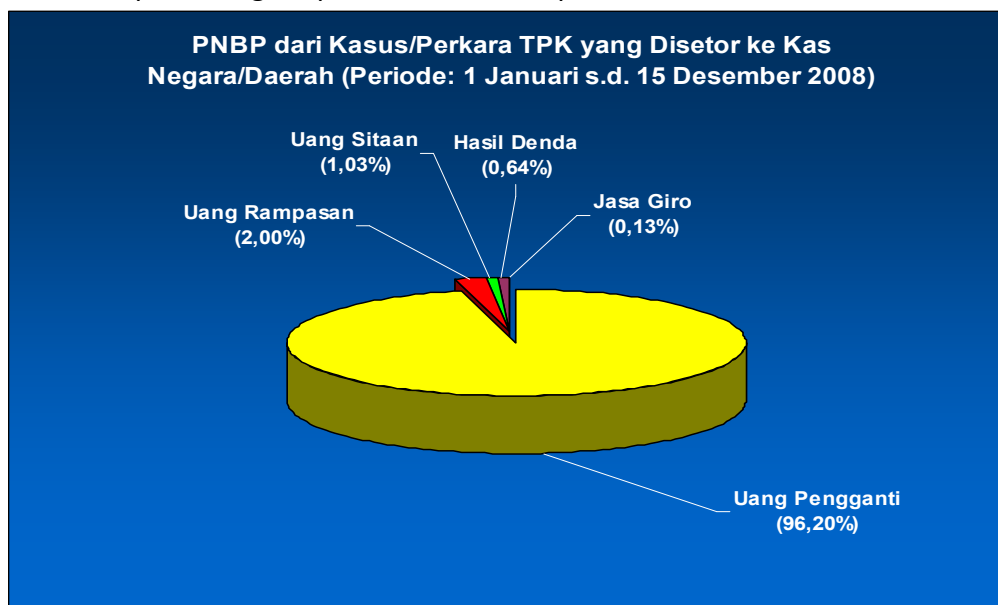
| Tahun | Kasus | Lokasi | Dilimpahkan kepada |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 | Dugaan TPK dalam Pemberian Kredit kepada PT Lima Jayakarta Utama pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Periode Tahun 2003 s.d. 2005 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) | Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta dengan surat pengantar pelimpahan kasus Nomor: R-1178/01/IV/2008 tanggal 28 April 2008 |
| | Dugaan TPK pada belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Banyuasin TA 2004 | Kab Banyuasin | Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan surat pelimpahan Nomor: R-1179/01/IV/2008 tertanggal 28 April |

| | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2008 |
| | Dugaan TPK pada Penggunaan Dana untuk Biaya Pendidikan dan Beasiswa TA 2007 di Pemerintah Daerah Kutai Barat | Pemerintah Daerah Kutai Barat | Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan surat pelimpahan Nomor: R-1366/01/V/2008 |
| | Dugaan TPK terkait Penyimpangan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kota Palu Tahun Anggaran 2006 | Kota Palu | Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan surat pelimpahan Nomor: R-3722/01/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 |

VI. Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil diselamatkan

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 15 Desember 2008 yang berasal penanganan kasus/perkara TPK sebesar **Rp406.352.031.726,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan, sebesar Rp390.917.318.111,00
- Uang rampasan, sebesar Rp8.118.672.000,00
- Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan, sebesar Rp4.200.621.163,00
- Pendapatan hasil denda, sebesar Rp2.600.000.000,00
- Pendapatan jasa giro, sebesar Rp515.160.452,00
- Pendapatan ongkos perkara, sebesar Rp260.000,00



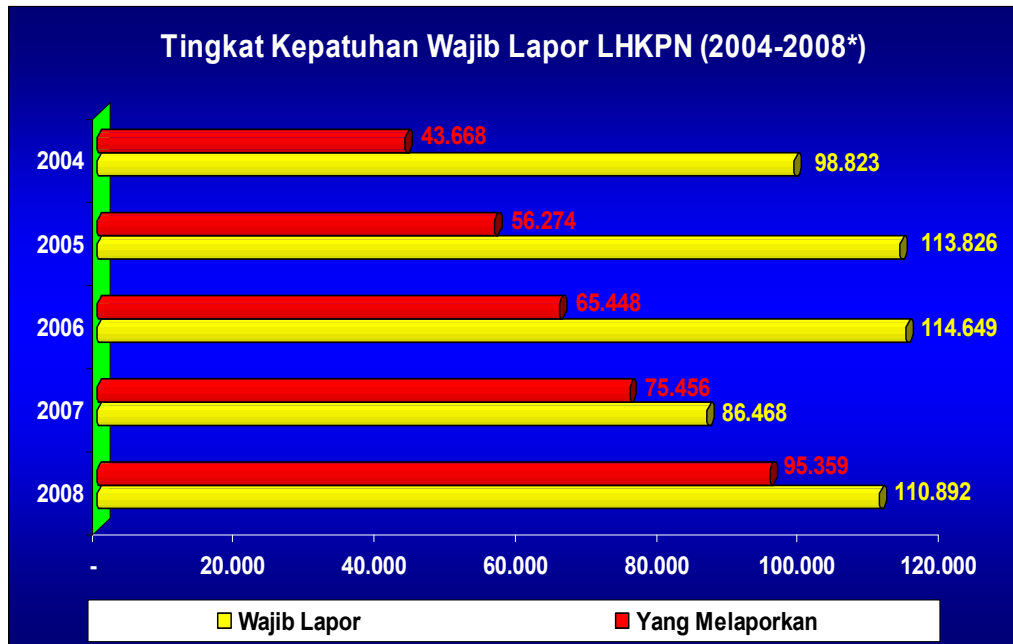
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Sebagai upaya preventif dalam penyelenggaraan korupsi, KPK telah melakukan upaya-upaya untuk membangun akuntabilitas Penyelenggara Negara (PN) melalui transparansi PN kepada publik dan pemeriksaan LHKPN yang efektif.

1. Peningkatan Transparansi PN kepada Publik, dengan cara:

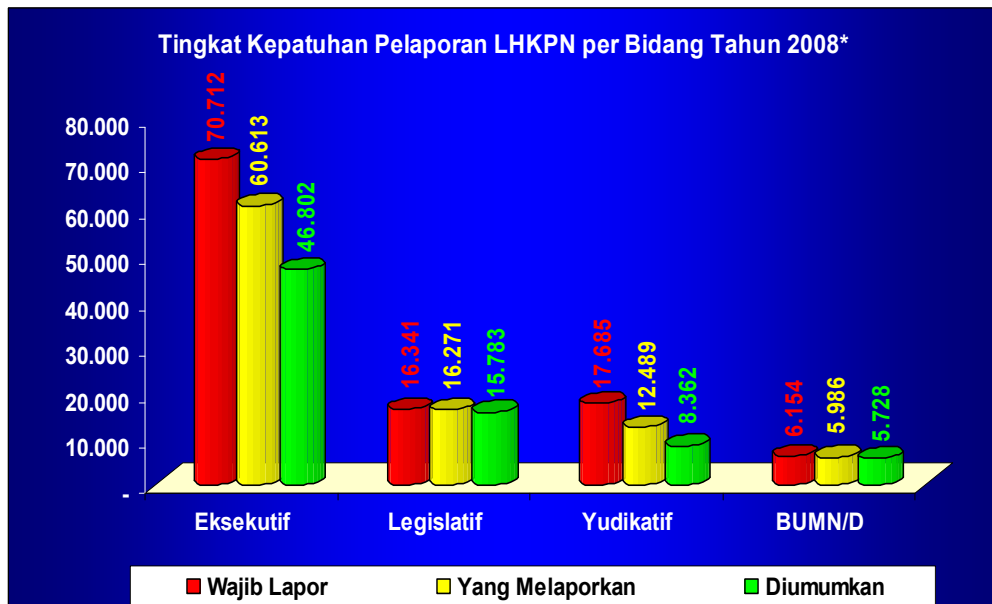
- Upaya peningkatan kepatuhan

Tingkat peningkatan atas tingkat kepatuhan pada Penyelenggara Negara (PN) dalam menyampaikan LHKPN dari tahun 2007 sampai 2008 tampak pada grafik di bawah ini:



* Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi sesuai dengan keaktifan pelaporan dari instansi

Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2008 dilihat per Bidang, berturut-turut Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan BUMN/D terlihat seperti pada grafik di bawah ini:



Ringkasan pelaporan Penyelenggara Begara yang wajib lapor dan yang telah melaporkan LHKPN tahun 2008 per Provinsi sebagai berikut:

**RINGKASAN PELAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
INSTANSI DAERAH
Status Laporan: 15 Desember 2008**

| Provinsi | Wajib Lapor | Yang Melaporkan | Diumumkan |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Bali | 1.981 | 1.898 | 1.766 |
| Banten | 852 | 801 | 726 |
| Bengkulu | 740 | 641 | 570 |
| D.I. Yogyakarta | 1.734 | 1.687 | 1.648 |
| DKI Jakarta | 1.091 | 1.072 | 1.012 |
| Gorontalo | 297 | 273 | 256 |
| Jambi | 1.052 | 1.006 | 912 |
| Jawa Barat | 4.294 | 4.084 | 3.699 |
| Jawa Tengah | 4.238 | 4.065 | 3.751 |
| Jawa Timur | 4.295 | 4.053 | 3.772 |
| Kalimantan Barat | 1.176 | 896 | 790 |
| Kalimantan Selatan | 2.231 | 1.824 | 1.695 |
| Kalimantan Tengah | 2.159 | 2.098 | 1.721 |
| Kalimantan Timur | 2.791 | 2.576 | 2.288 |
| Kep. Bangka Belitung | 457 | 372 | 328 |
| Kep. Riau | 992 | 974 | 845 |
| Lampung | 1.918 | 1.716 | 1.613 |
| Maluku | 1.571 | 951 | 605 |
| Maluku Utara | 364 | 360 | 330 |
| Nanggroe Aceh D. | 1.508 | 1.207 | 911 |
| Nusa Tenggara Barat | 2.133 | 2.022 | 1.686 |
| Nusa Tenggara Timur | 1.066 | 939 | 809 |
| Papua | 678 | 637 | 537 |
| Papua Barat | 165 | 142 | 117 |
| Riau | 1.560 | 1.457 | 1.293 |
| Sulawesi Barat | 215 | 198 | 169 |
| Sulawesi Selatan | 1.841 | 1.565 | 1.313 |
| Sulawesi Tengah | 726 | 627 | 370 |
| Sulawesi Tenggara | 576 | 442 | 352 |
| Sulawesi Utara | 622 | 569 | 465 |
| Sumatera Barat | 1.502 | 1.431 | 1.182 |
| Sumatera Selatan | 2.878 | 2.834 | 2.602 |
| Sumatera Utara | 2.100 | 1.787 | 1.507 |
| TOTAL | 51.803 | 47.204 | 41.640 |

** Jumlah Wajib LHKPN berfluktuasi sesuai dengan keaktifan pelaporan dari instansi*

- Pengumuman LHKPN ke dalam Tambahan Berita Negara (TBN) melalui PNRI: telah dilakukan pengumuman LHKPN sebanyak **18.185 PN** dan **1.234 PN** yang tidak di-TBN-kan karena merupakan pembaharuan dua tahunan
- Siaran pers pengumuman LHKPN untuk mengumumkan sebelas Pejabat dan Mantan Pejabat Setingkat Menteri dan 5 orang Mantan Pimpinan KPK

2. Efektivitas Pemeriksaan LHKPN

Pemeriksaan LHKPN yang efektif telah dilakukan klarifikasi terhadap 367 PN, pemeriksaan substantive 103 PN, pemriksaan khusus yang dilimpahkan ke Direktorat/Instansi lain sebanyak 14 kasus, pemeriksaan yang menghasilkan rekomendasi perbaikan dan prosedur sebanyak 3 kasus. Pemeriksaan investigative sampai dengan 10 Desember 2008 sebanyak 14 kasus, dengan perincian 12 kasus diteruskan ke Penyelidikan KPK, satu kasus dilimpahkan ke Kepolisian sedangkan satu kasus masih dalam proses pendalaman.

Penanganan Gratifikasi

1. Pelaporan Gratifikasi

Hingga 10 Desember 2008, terdapat 259 laporan Gratifikasi yang masuk. Dari jumlah tersebut, 215 Laporan sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK. Uang yang ditetapkan menjadi Milik Negara hingga 10 Desember 2008 sebesar Rp3.631.637.407,00 (termasuk luncuran dari akhir tahun 2007) dan barang senilai Rp1.309.947.000,00 (termasuk lima buah mobil).

REKAP PELAPORAN GRATIFIKASI KPK TH. 2008 (per 10 Desember 2008) BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN & WILAYAH

DATA LAPORAN GRATIFIKASI TH. 2008

Menurut Status Kepemilikan

| No | Status | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | Milik Penerima | 69 |
| 2 | Milik Negara | 78 |
| 3 | Sebagian Milik Negara | 68 |
| 4 | Masih Dalam Proses | 44 |
| 5 | Dikirim Surat | 0 |
| | | |
| | | 259 |

DATA LAPORAN GRATIFIKASI TH. 2008

Menurut Wilayah di Indonesia

| No | Wilayah | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1 | Sumatera Utara | 5 |
| 2 | Sumatera Barat | 3 |
| 3 | Jambi | 2 |
| 4 | Riau | 3 |
| 5 | Sumatera Selatan | 1 |
| 6 | Bangka Belitung | 1 |
| 7 | Lampung | 3 |
| 8 | Jakarta | 153* |
| 9 | Jawa Barat | 19 |
| 10 | Jawa Tengah | 49** |
| 11 | DI Yogyakarta | 1 |
| 12 | Jawa Timur | 10 |
| 13 | Kalimantan Barat | 3 |
| 14 | Kalimantan Selatan | 1 |
| 15 | Kalimantan Timur | 2 |
| 16 | Sulawaesi Selatan | 1 |
| 17 | Papua | 2 |
| | | 259 |

Catatan:

*) Termasuk Pemerintah Pusat

***) Sebagian besar Kepala Sekolah (Block Grant & DAK)

2. Pemeriksaan Gratifikasi

Sampai akhir November 2008, pemeriksaan gratifikasi yang terdiri dari beberapa jenis antara lain:

- Data dari Laporan LHKPN : 16 penelaahan
- Data dari Informasi Pengaduan Masyarakat : 36 penelaahan
- Inisiatif Direktorat Gratifikasi : 46 penelaahan
- Potensial Report dan Proposal : 13 pemeriksaan

3. Kegiatan Penunjang Pemahaman Gratifikasi

- a. **Sosialisasi** yang dilakukan oleh KPK kepada: Kementerian/Departemen/LPND, Komisi, Pemda, BUMN, Radio/TV, Perusahaan Swasta serta LSM dan Organisasi Lainnya
- b. **Diseminasi Form Gratifikasi dan perangkat lainnya**

Telah dilakukan pula distribusi perangkat sosialisasi berupa Box Acrylic sebanyak 760 buah, serta perangkat sosialisasi lainnya sejumlah 23.419 buah berupa stiker, poster, dan leaflet. Hingga November 2008 telah terdistribusi sebanyak 64.086 lembar formulir Gratifikasi.

Monitor

Monitor terhadap lembaga negara dan pemerintah dilakukan dengan mengkaji sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara dan pemerintah, memberikan saran perbaikan dan memantau implementasi saran perbaikan.

Tugas monitoring dilakukan melalui empat kegiatan pokok, yaitu:

1. Kajian sistem. Selama periode Januari-Oktober 2008, kajian sistem yang telah dilaksanakan meliputi:
 - Kajian sistem pelayanan perpajakan
 - Kajian sistem perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - Kajian sistem pengelolaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
 - Kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional
2. Kajian literatur meliputi:
 - Kajian tentang peraturan manajemen sumber daya manusia untuk PNS
 - Kajian tentang bantuan operasional sekolah (BOS)
 - Kajian tentang buku sekolah
 - Kajian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.
3. Kajian pemicu yang telah dilakukan adalah:
 - Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh tiga institusi yaitu Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan sebagai *pilot project*.
 - Mendorong Departemen Dalam Negeri untuk menyempurnakan sistem *single identification number* (SIN)
 - Penguatan kapasitas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
4. Pemantauan implementasi saran perbaikan dilakukan terhadap perbaikan sistem pelayanan pertanahan, keimigrasian, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), administrasi impor, dan pelayanan perpajakan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan dugaan TPK dari masyarakat oleh KPK dilakukan melalui kegiatan:

- Penerimaan pengaduan dugaan TPK secara langsung dan tidak langsung;
- Verifikasi atas pengaduan dugaan TPK, untuk menentukan apakah pengaduan yang diterima dari masyarakat merupakan TPK; maupun menentukan apakah pengaduan TPK tersebut masuk dalam kewenangan KPK atau tidak;
- Penelaahan pengaduan dugaan TPK untuk menentukan unsur-unsur TPK dan apakah pengaduan tersebut telah dilengkapi bukti permulaan;

- Melakukan *case building* atas pengaduan tersebut dan mengusulkan tindak lanjutnya.

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, **31.404** berkas pengaduan telah teradministrasikan dalam database pengaduan masyarakat. Dari jumlah ini, sebanyak **31.096 (99,02%)** pengaduan telah selesai ditelaah, **4.078 (12,99%)** pengaduan dapat ditindaklanjuti baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK, sedangkan **22.022 (70,12%)** pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan penelaahan bukan merupakan TPK, kurangnya informasi dan bukti atau petunjuk awal, serta identitas dan alamat pelapor yang tidak jelas. Rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat selama 2004-2008 terlihat pada grafik di bawah ini.

| Laporan Kemajuan Penanganan Laporan Masyarakat s.d. 15 Desember 2008 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| I. a. Jumlah Laporan yang diterima | 2.281 | 7.361 | 6.939 | 6.510 | 8.313 | 31.404 |
| b. Jumlah Laporan yang telah ditelaah | 2.281 | 7.361 | 6.939 | 6.510 | 8.005 | 31.096 |
| c. Jumlah Laporan yang sedang ditelaah | - | - | - | - | 308 | 308 |
| II. Dari Jumlah Laporan yang telah ditelaah (I.b) | | | | | | |
| Jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan | | | | | | |
| a. dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang | 1.089 | 1.315 | 650 | 570 | 454 | 4.078 |
| b. Jumlah yg diteruskan ke Internal KPK Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang a.l. | 27 | 108 | 196 | 218 | 322 | 871 |
| c. karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (di 'File' kan) | 1.050 | 5.850 | 6.029 | 5.539 | 3.554 | 22.022 |
| d. Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses Riviu, Perbaikan hasil riviu | 115 | 88 | 64 | 183 | 3.675 | 4.125 |
| | 2.281 | 7.361 | 6.939 | 6.510 | 8.005 | 31.096 |
| e. Laporan yang berindikasi TPK : (Laporan Ditelaah – Laporan yg di-File-kan) | 1.231 | 1.511 | 910 | 971 | 4.451 | 9.074 |
| III. Dari Laporan yang ditindaklanjuti (II.a) | | | | | | |
| A. - Diteruskan ke Kepolisian | 205 | 320 | 153 | 158 | 133 | 969 |
| - Diteruskan ke Kejaksaan | 463 | 480 | 234 | 226 | 210 | 1.613 |
| - Diteruskan ke BPKP | 112 | 120 | 86 | 33 | 5 | 356 |
| - Diteruskan ke Itjen & Badan lain diluar BPKP | 153 | 218 | 80 | 41 | 34 | 526 |
| - Diteruskan ke BPK | 33 | 49 | 50 | 81 | 51 | 264 |
| - Diteruskan ke MA | 38 | 26 | 6 | 6 | 6 | 82 |
| - Diteruskan ke Bawasda | 85 | 102 | 41 | 25 | 15 | 268 |
| | 1.089 | 1.315 | 650 | 570 | 454 | 4.078 |
| B. Diteruskan ke internal KPK (II.b) | | | | | | |
| - ke Penindakan | 21 | 52 | 141 | 153 | 233 | 600 |
| - ke Pencegahan | 5 | 46 | 41 | 50 | 58 | 200 |
| - ke bidang lainnya | 1 | 10 | 14 | 15 | 31 | 71 |
| | 27 | 108 | 196 | 218 | 322 | 871 |

Pengaduan masyarakat per provinsi terlihat pada tabel di bawah ini:

**Jumlah Surat Laporan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan Provinsi
s.d. 15 Desember 2008**

| No | Provinsi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
|----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | NANGGROE ACEH DARUSALAM | 56 | 147 | 203 | 127 | 59 | 592 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 203 | 694 | 621 | 515 | 493 | 2.526 |
| 3 | RIAU | 86 | 237 | 195 | 211 | 184 | 913 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 41 | 98 | 97 | 142 | 62 | 440 |
| 5 | SUMATERA BARAT | 34 | 133 | 100 | 110 | 115 | 492 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 140 | 415 | 389 | 260 | 208 | 1.412 |
| 7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 10 | 36 | 32 | 45 | 36 | 159 |
| 8 | JAMBI | 59 | 139 | 115 | 139 | 132 | 584 |
| 9 | BENGKULU | 24 | 81 | 93 | 81 | 52 | 331 |
| 10 | LAMPUNG | 35 | 184 | 130 | 157 | 97 | 603 |
| 11 | JAWA BARAT | 139 | 481 | 616 | 577 | 417 | 2.230 |
| 12 | BANTEN | 45 | 127 | 145 | 125 | 113 | 555 |
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 49 | 147 | 132 | 144 | 85 | 557 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 21 | 109 | 112 | 91 | 90 | 423 |
| 15 | KALIMANTAN BARAT | 58 | 148 | 108 | 79 | 80 | 473 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 82 | 284 | 244 | 252 | 129 | 991 |
| 17 | DKI JAKARTA | 403 | 1.308 | 1.427 | 1.191 | 780 | 5.109 |
| 18 | D.I. YOGYAKARTA | 19 | 96 | 68 | 87 | 46 | 316 |
| 19 | JAWA TENGAH | 132 | 539 | 406 | 482 | 338 | 1.897 |
| 20 | JAWA TIMUR | 217 | 793 | 609 | 613 | 436 | 2.668 |
| 21 | SULAWESI UTARA | 39 | 93 | 64 | 90 | 72 | 358 |
| 22 | SULAWESI SELATAN | 71 | 243 | 211 | 202 | 185 | 912 |
| 23 | SULAWESI TENGAH | 26 | 62 | 81 | 72 | 28 | 269 |
| 24 | SULAWESI TENGGARA | 27 | 62 | 69 | 73 | 34 | 265 |
| 25 | GORONTALO | 10 | 25 | 27 | 44 | 29 | 135 |
| 26 | PAPUA | 50 | 114 | 80 | 74 | 80 | 398 |
| 27 | BALI | 27 | 100 | 82 | 76 | 72 | 357 |
| 28 | NUSA TENGGARA BARAT | 64 | 120 | 159 | 131 | 98 | 572 |
| 29 | NUSA TENGGARA TIMUR | 37 | 145 | 82 | 67 | 83 | 414 |
| 30 | MALUKU UTARA | 14 | 44 | 41 | 41 | 27 | 167 |
| 31 | MALUKU | 26 | 65 | 66 | 62 | 71 | 290 |
| 32 | IRIAN JAYA BARAT | 6 | 36 | 29 | 52 | 17 | 140 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 18 | 32 | 20 | 47 | 37 | 154 |
| LN | Luar Negeri | 13 | 21 | 47 | 17 | 4 | 102 |
| X | Belum diidentifikasi asal provinsinya | - | 3 | 39 | 34 | 3.524 | 3.600 |
| | Jumlah | 2.281 | 7.361 | 6.939 | 6.510 | 8.313 | 31.404 |